

Robertus Robert

# Yang Politis sebagai Nostalgia

Tanggapan atas pidato ilmiah Goenawan Mohamad, *Demokrasi dan Disilusi*, dalam Nurcholish Madjid Memorial Lecture II, Jakarta 23 Oktober 2008

Naskah ini dan naskah terkait lainnya telah dibukukan dalam *Goenawan Mohamad: Demokrasi dan Kecewaan*, disunting oleh Ihsan Ali-Fauzi dan Samsu Rizal Panggabean, diterbitkan oleh Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) dan Yayasan Wakaf Paramadina, bekerja sama dengan PT Newmont Pacific Indonesia (NPN) dan Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gadjah Mada (MPRK-UGM) • Jakarta, April 2009 • ISBN 978-979-19725-0-5

*Versi PDF naskah ini disediakan oleh goenawanmohamad.com dan dagdigdug.com*

*Publikasi ulang oleh Jaringan Langsung @ 17 Juni 2009*

*© Hak cipta dilindungi oleh undang-undang*

Setelah era gegap gempita penjatuhan Soeharto redup, kepolitikan dimaknai sebagai sebidang ruang pasti yang hanya bisa diperbaharui melalui penataan norma dan institusionalisasi. Ini berlangsung terutama karena banyak pihak memang dari awal mengambil sikap kompromi terhadap rezim lama. Konsensus sudah dicapai bahkan sebelum antagonisme dimulai. Kompromi terbesar dibuktikan dari diterimanya rezim kelanjutan dan pemilu yang ditawarkannya pasca penjatuhan Soeharto itu. Penerimaan dan kompromi itu, secara dramatis menginterupsi dan mengakhiri gairah reformis dalam menghasilkan perubahan-perubahan yang lebih berarti.

Sejak itu, politik yang menyeruak dalam peristiwa sesaat yang melahirkan pembaharuan dalam sensasi universalitasnya berubah. Gairah berubah menjadi hukum, gerakan berubah menjadi prosedur, semangat berubah menjadi institusi, kontradiksi berubah menjadi konsensus dan normativisasi. Dengan dasar pandangan itu, politik disempitkan sebagai pembaharuan dan dialirkan ke dalam produksi massal lembaga-lembaga, partai dan komisi-komisi. Gerak, gerilya dan kritik yang sebelumnya subur di mana-mana redup. Digantikan dengan disiplin semu kelembagaan. Kehilangan ini mengawali kehilangan yang lebih dalam, yakni hilangnya ingatan dan kepercayaan terhadap "politik perjuangan" atau politik oposisional alternatif. Korupsi, fanatisme dan keterbelakangan imajinasi yang datang kemudian makin mengubur daya tarik politik ketika masih dialami sebagai peristiwa luar biasa di jalan-jalan, di kampus-kampus, di ruang-ruang subversif. Persis ketika demokrasi dimulai, politik kehilangan pesonanya. Di dalam demokrasi, politik tinggal nostalgia.

Di titik inilah kita menemukan dua jenis politik. Yang pertama adalah politik yang hanya muncul di seputar peristiwa-peristiwa "besar", politik sebagai — dalam istilah Alain Badiou — "kejadian" Politik di sini disebut sebagai "yang politis". Ia merupakan kulminasi dari gerak, keberanian, subyektifitas bersama-sama dengan kolektifitas dan universalitas yang mengarah ke kebaruan. Kebaruan dalam masyarakat, kebaruan dalam kebudayaan dan kebaruan dalam ciri kemanusiaan. Inilah politik sebagai yang tak bisa dinamai. Tapi justru oleh karena itu ia malah menyatukan berbagai fragmen yang semula berserak. Ia yang dalam suatu saat sempat menyatukan mahasiswa, LSM, politisi, pensiunan tentara, kaum radikal, kaum pengusaha, kaum buruh dalam suatu rongga enersi, imajinasi dan harapan dalam cakrawala yang dengan gampang disebut sebagai reformasi.

"Reformasi' dengan demikian sebenarnya hanya merupakan nama saja dari politik sebagai "yang politis". Reformasi adalah simbolisasi baru untuk mengisi "yang politik" sehingga dengan itu simbolisasi lama dapat benar-benar dipatahkan.

Di titik ini, persis ketika simbolisasi lama patah, dan reformasi muncul sebagai simbol baru yang menggantikannya dengan berbagai nama-nama lanjutan seperti pemerintahan reformasi, agenda reformasi, kabinet reformasi. Reformasi melepaskan diri sebagai nama dari "yang politis". Reformasi memapankan diri sebagai simbol, struktur atau nama rejim baru. Akibatnya, persis ketika ia mengukuhkan diri dalam keamanan, ia jatuh dalam hukum kelapukan.

Ia menjadi struktur yang merupakan sarang baru dari berbagai obyek keterbelakangan politik. Para koruptor bersarang dalam reformasi, kaum munafik dan fanatik bersuara atas nama reformasi, pelanjut otoritarianisme bersembunyi dalam "kebaikan" reformasi. Dengan ini, reformasi yang semula menjadi nama dan simbol dari suatu peristiwa yang luar biasa (kejadian) telah mengalami kemerosotan. Ia bukan lagi wahana dari "yang politis". Di titik ini kita menemukan politik dalam jenisnya yang kedua: politik sebagai politik, sebagai persaingan rutin mengejar kuasa dengan beragam cara.

Politik dalam jenis yang kedua inilah yang dalam pandangan awam disebut dan dinamai sebagai politik. Dengan itu, mereka yang awam dan seluruh peserta dalam tubuh kepolitikan dari politik ini menerima dan memaklumi suatu standar keadaan, yakni bahwa politik adalah kedurjanaan instrumental yang dipakai untuk mengejar kepentingan. Apa pun agama dan klaim ideologinya semua yang "berjuang" dalam cara dan matriks politik semacam ini pada dasarnya sungguh tak ada bedanya. Di titik ini kita menemukan perbedaan antara "yang politis" dengan demokrasi.

Oleh karena pengalaman dan latar belakang historis yang spesifik, demokrasi kita pandang sebagai suatu tahap baru hasil dari pembalikan otoritarianisme. Lebih jauh lagi, karena demokrasi datang sebagai hasil dari kehadiran "yang politis", seringkali ia diidentikkan atau disamakan dengan "yang politis". Di sini, pada umumnya orang mengenali "yang politis" sebagai "suasana demokrasi". Ia dirasakan sebagai kondisi mental di mana publik bisa mengekspresikan kebebasan secara optimum sehingga dengan itu bentuk-bentuk antagonisme politik tampil. Di titik ini berbeda dengan 'yang politis'. Demokrasi pada dasarnya memiliki suatu kesamaan dengan otoritarianisme: keduanya menunjuk pada tatanan atau pada cara pemerintahan. Keduanya menekankan prosedur, institusi, tatanan dan order. Yang membedakan keduanya adalah pada soal siapa yang mengisi tatanan. Demokrasi mengandaikan absennya klaim untuk mengisi tatanan secara tetap, sementara otoritarianisme dan sejenisnya mengklaim mengisi tatanan secara lengkap, penuh dan tetap. Demokrasi hadir sebagai mekanisme dan prosedur untuk "tidak melakukan apa-apa", ia membiarkan tatanan sebagai gelanggang kosong. Sebagaimana reformasi, demokrasi adalah bentuk bahkan tahap kepolitikan yang telah ternamai dan memiliki standar yang bisa diobyektifikasi secara pasti. Sementara "yang politis", meski ia "*ada di sana*", namun tetap tak pernah bisa dinamai.

**D**i titik inilah kita kemudian bisa membaca kegelisahan Goenawan Mohammad (GM). Ketika kita menerima demokrasi, maka kita menerima sebuah sistem yang tak pernah bisa dan tak boleh kita pastikan bagaimana ujungnya dan siapa-siapa saja pemain-pemain dalamnya. Demokrasi adalah prosedur untuk segala kemungkinan.

Bagi GM, kemungkinan di sini termasuk kemungkinan matinya "yang politis". Di titik ini kekhawatirannya bermula. Untuk itulah ia kemudian mengajukan suatu imbauan nostalgis dengan cara Kantian.

Dasar imbauan itu tentu saja adalah empati terhadap "yang politis". Yang jadi soal adalah justru dengan imbauan semacam itu, GM mengambil risiko besar untuk memposisikan (baca: mendegradasikan) "yang politis" sebagai sejenis kategori transendental yang bisa dilindungi secara "moral" oleh komponen-komponen di dalam kepolitikan demokratis. Dengan itu di dalam GM, terbersit semacam pandangan bahwa "yang politis" bisa diobyektifikasi sebagai syarat normatif tertentu bagi kepolitikan demokratis. Artinya lebih jauh lagi, GM memposisikan atau setidaknya melihat "yang politis" sebagai bagian dari prosedur normatif di dalam demokrasi. Dalam bahasa Lacanian, aspirasi GM terhadap "yang politis" secara paradoks justru telah mendorongnya untuk menjatuhkan "yang politis" dari "*the real*" (sang nyata) menjadi "*the symbolic*" (sang simbolik). Paradoks yang, saya kira, tidak dimaksudkan oleh GM.

Di titik ini, paradoks subyektif GM tadi mesti kita balik dengan membuang aspirasi Kantiannya. Untuk itu kita perlu Ricoeur. Di tahun 1965, dalam jurnal *History and Truth*, Paul Ricoeur pernah menulis bahwa "*politics only exist in great moment in crisis.*" Ini dikemukakannya dengan basis pandangan mengenai politik sebagai paradoks. Menurut Ricoeur, paradoks politik muncul karena politik memiliki asal-muasal ganda: rasionalitas dan kedurjanaan (*a specifically political rationality and a specifically political evil*). Oleh karenanya, politik selalu memiliki "otonomi relatif" di dalamnya.

Dengan itu Ricoeur memperkenalkan pemisahan awal antara "*the political*" atau "Yang Politis" dengan "*politics*" atau politik—atau, dalam istilah Lefort: antara *le politique* (*the political*) dan *la politique* (*politics*). Dengan pemisahan dan upaya otonomisasi ini, "yang politis" dalam Ricoeur dipandang sebagai realisasi dari relasi manusia yang tidak dapat direduksi ke dalam kategori apa pun. Sementara, dengan politik, yang dimaksudkannya adalah segala bentuk kedurjanaan dan permainan dalam kekuasaan.

Pengertian yang sama juga kita temukan dalam salah satu penjelasan paling esensial dalam filsafat politik, yakni melalui pemikiran Machiavelli. Ketika ia mengatakan bahwa politik adalah "ketegangan" antara virtu (yang pasti/ yang rasional/struktur/symbolik) dengan fortuna (yang tak pasti/tak diketahui/ketaktungkinan/"sang nyata").

Dari sini, melalui Ricoeur dan Machiavelli, kita dapat memposisikan bahwa "yang politis" pada dasarnya adalah persimpangan antara "rasionalitas" dan kedurjanaan. "Yang politis" adalah gerak pertemuan antara segenap bentuk simbolisasi terhadap "ketaktungkinan" (baca: *the real* atau sang nyata).

Artinya "yang politis" tidak pernah dapat dipastikan secara a priori sebagai suatu kategori normatif. Kedurjanaan adalah faktisitas dalam demokrasi. Oleh karenanya, ia tidak dapat dienyahkan hanya melalui suatu penerapan kategori etis-normatif. Pada saat yang sama, "yang politis" juga adalah faktisitas. Bedanya adalah, kalau kedurjanaan ada sebagai fakta di level realitas empirik, maka "Yang Politis" ada sebagai realitas di dalam level metafisik. Artinya, "Yang Politis" ada "di sana" namun ia tidak pernah bisa diberi nama dan diprediksi serta dipastikan kapan dan di mana.

Di titik ini, mekipun kita menerima suatu kenyataan bahwa demokrasi adalah sarang dari berbagai durjana, demokrasi tidak akan pernah bisa "membunuh" "yang politis". Oleh karena itu, sebenarnya kita tidak perlu membangun imbauan yang berbasis pada kekhawatiran bahwa "demokrasi" akan menenggelamkan "yang politis". Kedurjanaan demokrasi "hanyalah" sebetuk simbolisasi lain yang samasama diarahkan kepada "yang politis". "Yang Politis" dalam skema ini tidak lain adalah "sang nyata" dan demokrasi bukan lain kecuali "sang simbolik", dalam skema triadik Lacanian. Demikian, karena Yang Simbolik tak kan pernah bisa menguasai Yang Nyata.

"Yang Politis" tidak bisa dinamai dan tidak bisa dibunuh. Ia hanya bisa dimengerti dan dimaknai secara sementara karena keterbatasan penandaan yang ada (politik, struktur, simbolik). Dengan demikian, singkatnya, hubungan kedurjanaan dalam faktisitas struktur simbolik dalam kepolitikan dengan "yang politis" tidak dapat dimengerti dalam koordinat epistemik dan moral Kantian. Ia hanya bisa dipahami dalam suatu kerja negativitas. Artinya, demokrasi dengan seluruh keterbelakangan di dalamnya memang senantiasa berkemungkinan bergerak ke arah kedurjanaan. Oleh karenanya, upaya untuk "memelihara nostalgia" akan "yang politis" hanya bisa dilakukan dalam kerangka "kerinduan" akan yang politis dalam harapan bahwa suatu ketika "yang politis" akan kembali muncul dalam kejadian. Di titik ini, hanya melalui syarat kesetiaan dalam "yang politis" saja kita dapat melampaui kedurjanaan dan keterbelakangan dalam demokrasi masa kini.

Sidamanik, 21 Desember 2008

**ROBERTUS ROBERT** adalah Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D). Memperoleh gelar doktor dalam bidang filsafat dari Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, ia menulis *Republikanisme dan Keindonesiaan: Sebuah Pengantar* (2007) dan *Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi di Indonesia: Sebuah Refleksi Kritis* (2008), serta ikut menyumbangkan tulisan dalam *Kembalinya Politik* (2008).